

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL
DAN BELANJA MODAL DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN / KOTA DI JAWA
PROVINSI TIMUR TAHUN 2009 - 2013**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Aditya Iman Taufick
125020100111066**



**KONSENTRASI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAN BELANJA MODAL DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 - 2013

Yang disusun oleh :

Nama : Aditya Iman Taufick
NIM : 125020100111066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juni 2016

Malang, 21 Juli 2016

Dosen Pembimbing,

Dr. Moh. Khusaini, SE., MSi., MA.
NIP. 19710111 199802 1 001

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAN BELANJA MODAL DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2009 - 2013**

Aditya Iman Taufick, Khusaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: adityaimantaufick@yahoo.com

ABSTRACT

National development can be realized if the regional development berrjalan well. And regional development will be realized if the region to improve the quality of society (human development). Human development can be measured by the Human Development Index (HDI), where the indicator is on education, health and decent living standards. HDI districts and cities in East Java province tends to increase every year and are in the middle position of the HDI. The level of local fiscal autonomy will affect the welfare of a region depends on how local governments prioritize revenue allocation. With a few variables have been determined, the study aims to: (1) know how to influence fiscal independence of the HDI districts in East Java province, (2) know how to influence capital spending areas of the HDI districts in East Java province, (3) determine how the development of fiscal independence 38 counties and cities in East Java province. The place and time of this study are in all districts and cities in East Java during 2009 - 2013. The analytical method to be used is the panel data regression. Results of the study using a fixed effect model showed that fiscal independence and local capital expenditure and significant positive effect on the human development index.

Keywords : *Human Development Index, Fiscal Autonomy, the Regional Capital Expenditure*

ABSTRAK

Pembangunan nasional dapat terwujud apabila pembangunan daerah berjalan dengan baik. Dan pembangunan daerah akan terwujud apabila daerah meningkatkan kualitas masyarakat (pembangunan manusia). Pembangunan manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana indikatornya yaitu mengenai pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPM kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berada pada posisi IPM yang menengah. Tingkat kemandirian fiskal daerah juga akan mempengaruhi kesejahteraan suatu daerah tergantung dari bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan pengalokasikan pendapatannya. Dengan beberapa variabel yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui bagaimana pengaruh kemandirian fiskal terhadap IPM kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, (2) mengetahui bagaimana pengaruh belanja modal daerah terhadap IPM kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, (3) mengetahui bagaimana perkembangan kemandirian fiskal 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Tempat dan waktu penelitian ini adalah pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur selama tahun 2009 – 2013. Metode analisis yang akan digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menggunakan *fixed effect model* menunjukkan bahwa kemandirian fiskal dan belanja modal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci : *Indeks Pembangunan Manusia, Kemandirian Fiskal, Belanja Modal Daerah*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dimana keadaan yang akan datang harus lebih baik lagi daripada keadaan yang sebelumnya. Salah satu perubahan yang diharapkan yaitu berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada di daerah tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa pembangunan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan nasional dapat terwujud apabila pembangunan di setiap daerah berjalan dengan baik. Namun keberagaman kondisi sosial dan geografis Indonesia yang dipisahkan oleh pulau-pulau dan lautan, jadi masalah tersendiri bagi pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintahan daerah yang mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri melalui kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan lokal yang terjadi di daerah. Pada tahun 2001, di Indonesia telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mengatur mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua Undang-Undang bidang otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan bahwa pemberian kewenangan ke pemerintah daerah haruslah dengan wujud otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan dan mengelola segala potensi daerah sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat.

Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan memberikan proses pemberdayaan dan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang timbul di daerah yang ditujukan kepada masyarakat guna meningkatkan perekonomian dalam pembangunan daerah. Menurut Suparmoko (2002), tujuan kebijakan desentralisasi yaitu :

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah
2. peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat
3. mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, masing-masing kabupaten/kota daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, lalu mengelolanya, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah. Sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal akan menciptakan kemandirian fiskal bagi daerah kabupaten/kota. Jika hal yang diangan-angankan tersebut dapat terwujud maka pemerintah daerah akan mampu membiayai pembangunan daerah nya tanpa melibatkan campur tangan dari pemerintah pusat. Selain itu terdapat tujuan lain dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu dapat membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat mendorong tiap daerah agar lebih mandiri lagi dalam pengelolaan keuangannya guna menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat.

Menurut Mardiasmo *dalam* Septian Bagus (2008) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat. Dalam hal ini, pengalokasian modal sangatlah penting guna peningkatan pelayanan dan diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga pada alokasi belanja perlu diprioritaskan pada pelayanan dasar masyarakat

Kuncoro (2004) juga menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar efektif dalam pengalokasian belanja daerah. Di dalam belanja daerah terdapat belanja modal daerah yang mana belanja modal daerah tersebut merupakan investasi yang akan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk membelanjakan penerimaan daerah yang nantinya pemerintah akan memperoleh pendapatannya sendiri tanpa bergantung pada dana perimbangan. Jikalau belanja modal daerah benar-benar tepat sasaran, maka akan sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat atau pembangunan manusia

Secara umum diyakini bahwa sistem desentralisasi fiskal akan meningkatkan pembangunan manusia yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik haruslah terpenuhi dengan lebih baik jika diatur oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah sangatlah mengerti akan kondisi daerahnya. Oleh karena itu, daerah harus bekerja keras untuk menggali potensi pendapatan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dan apabila daerah tidak mempunyai potensi pendapatan, maka daerah tersebut akan sulit membiayai belanja daerah. Dan juga bila potensi pendapatan tersebut besar tapi tanpa dibarengi dengan kemampuan mengelola yang baik, maka akan sia-sialah potensi daerah tersebut. Secara teoritis, semakin besar potensi pendapatan daerah tersebut, maka akan semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Tetapi faktanya belum tentu

demikian, daerah yang kaya belum tentu tingkat kesejahteraan masyarakatnya tinggi pula. Contohnya yaitu pada Provinsi Papua yang seharusnya menjadi provinsi terkaya di Indonesia karena Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah. Namun kenyataan yang kita lihat bahwa masyarakat Papua masih dibawah dari kata sejahtera. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kekayaan alam yang besar tidak menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Sehingga kebutuhan akan peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan sangatlah penting, mulai dari peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan supaya masyarakat memiliki keterampilan, serta pendapatan untuk mencapai hidup yang layak. Oleh karena itu, kualitas manusia di suatu daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional di Indonesia Tahun 2011 - 2013

No.	Provinsi	2011		2012		2013	
		IPM	Ranking	IPM	Ranking	IPM	Ranking
1	Aceh	72,16	18	72,51	19	73,05	20
2	Sumatera Utara	74,65	8	75,13	8	75,55	8
3	Sumatera Barat	74,28	9	74,70	9	75,01	9
4	Riau	76,53	3	76,90	3	77,25	5
5	Jambi	73,30	13	73,78	13	74,35	13
6	Sumatera Selatan	73,42	10	73,99	10	74,36	12
7	Bengkulu	73,40	11	73,93	11	74,41	11
8	Lampung	71,94	20	72,45	20	72,87	21
9	Bangka Belitung	73,37	12	73,78	12	74,29	14
10	Kepulauan Riau	75,78	6	76,20	6	76,56	6
11	DKI Jakarta	77,97	1	78,33	1	78,59	1
12	Jawa Barat	72,73	16	73,11	16	73,58	17
13	Jawa Tengah	72,94	14	73,36	15	74,05	16
14	Yogyakarta	76,32	4	76,75	4	77,37	2
15	Jawa Timur	72,18	17	72,83	17	73,54	18
16	Banten	70,95	23	71,49	23	71,90	24
17	Bali	72,84	15	73,49	14	74,11	15
18	Nusa Tenggara Barat	66,23	32	66,89	32	67,73	33
19	Nusa Tenggara Timur	67,75	31	68,28	31	68,77	32
20	Kalimantan Barat	69,66	28	70,31	28	70,93	29
21	Kalimantan Tengah	75,06	7	75,46	7	75,68	7
22	Kalimantan Selatan	70,44	26	71,08	25	71,74	26
23	Kalimantan Timur	76,22	5	76,71	5	77,33	4
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	74,72	10
25	Sulawesi Utara	76,54	2	76,95	2	77,36	3
26	Sulawesi Tengah	71,62	22	72,14	22	72,54	23
27	Sulawesi Selatan	72,14	19	72,70	18	73,28	19
28	Sulawesi Tenggara	70,55	25	71,05	26	71,73	27
29	Gorontalo	70,82	24	71,31	24	71,77	25
30	Sulawesi Barat	70,11	27	70,73	27	71,41	28
31	Maluku	71,87	21	72,42	21	72,70	22
32	Maluku Utara	69,47	30	69,98	30	70,63	30
33	Papua Barat	69,65	29	70,22	29	70,62	31
34	Papua	65,36	33	65,86	33	66,25	34
Indonesia (BPS)		72,77		73,29		73,81	

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2015 (data dioalah peneliti)

Dari data tabel 1 diatas kita dapat melihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur masih tergolong rendah dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Meskipun dari tahun 2011 – 2013 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan tiap tahunnya, tapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa IPM Provinsi Jawa Timur masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Jika dilihat dari ranking masing-masing provinsi di Indonesia, nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 dan 2012 masih menempati peringkat

17 dari 33 provinsi. Sedangkan pada tahun 2013, nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur berada di peringkat 18 dari 34 provinsi. Bahkan nilai IPM Provinsi Jawa Timur masih berada dibawah rata-rata nilai IPM Nasional. Bila IPM merupakan Indikator kesejahteraan, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur masih rendah.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, salah satunya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apakah kebijakan tersebut pro rakyat miskin, atau kebijakan tersebut hanya meningkatkan angka-angka ekonomi semata. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut dapat dilihat melalui alokasi belanja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan sangat berpengaruh sekali terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, di era otonomi daerah ini, kemampuan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah harus berjalan dengan baik supaya kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Septian Bagus (2008), saat ini pemikiran tentang paradigma pembangunan telah mengalami pergeseran dari pembangunan yang menitik beratkan pada produksi (*production centered development*) pada tahun 1960 an ke paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) pada tahun 1970 an. Lalu pada tahun 1980 an, muncul paradigma pembangunan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya pada tahun 1990 an muncul paradigma pembangunan yang menekankan pada manusia (*human centered development*). Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengelompokkan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut UNDP dalam Septian Bagus (2004) IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, IPM tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti misalnya ketidaksetaraan dan sulit mengukur indikator-indikator seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan.

Konsep Kemandirian Fiskal

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai aspek pertumbuhan wilayah (*efficiency*), pemerataan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*) yang lebih berdimensi lokal dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menempatkan pemerintah daerah sebagai partner pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini tentunya harus didukung dengan keuangan daerah yang memadai, dimana daerah mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri sehingga daerah dapat dikatakan mandiri.

Menurut Kartasasmita dalam Septian Bagus (2008), mengatakan bahwa kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hakikat dari setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Tujuan pelaksanaan otonomi salah satunya memberikan peluang bagi kemandirian daerah untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pelimpahan kewenangan dalam bentuk desentralisasi fiskal. Kemandirian fiskal menjadi hal yang sangat penting bagi daerah, terutama terkait dengan sumbangan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Tim Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri RI dalam Septian Bagus (2008) membuat rumus untuk menghitung rasio kemandirian daerah dan membuat klasifikasi tentang kemandirian daerah. Dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan kemandirian Daerah Tingkat (Dati) II (sekarang kabupaten/kota) dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

Keterangan : Rasio KKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 TPD = Total Penerimaan Daerah

Tabel 2. Kualifikasi Kemandirian Keuangan Daerah

Skala	Persentase PAD trhdp TPD	Kualifikasi
1	0,00 % - 10,00 %	Sangat Kurang
2	10,01 % - 20,00 %	Kurang
3	20,01 % - 30,00 %	Sedang
4	30,01 % - 40,00 %	Cukup
5	40,01 % - 50,00 %	Baik
6	>50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Fisipol UGM & Balitbang Depdagri dalam Septian Bagus (2008)

Belanja Modal Daerah

Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Belanja modal seringkali dikeluarkan dengan tujuan membiayai pembangunan daerah, terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Komputer, Belanja Modal Pengadaan Mebel, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio , Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan, Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan, Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan / Keamanan

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan model kuantitatif dengan jenis data sekunder sebanyak 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada tahun 2009 - 2013. Teknik pengumpulan data bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan model matematis sebagai berikut :

$$\text{Log}(\text{IPM}_{it}) = \alpha + \beta_1 \log(\text{KF}_{it}) + \beta_2 \log(\text{BM}_{it}) + e_{it}$$

Dimana :

IPM = indeks pembangunan manusia
 KF = kemandirian fiskal
 BM = belanja modal daerah
 e = kesalahan pengganggu (*error of term*)
 α = konstanta

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan dua uji dalam menentukan model analisis data yang tepat. Uji pertama yang dilakukan adalah Uji Hausman untuk menyeleksi antara model Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Berikut adalah hasil uji Hausman yang telah dilakukan oleh peneliti:

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/30/16 Time: 17:38
 Sample: 2009 2013
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 38
 Total pool (unbalanced) observations: 189
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.44927	0.802058	82.84847	0.0000
KF?	0.154967	0.020734	7.474140	0.0000
BM?	0.629549	0.075180	8.373924	0.0000

Sumber : e-views 6, 2016, (data diolah peneliti)

Berdasarkan uji Hausman tersebut diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas adalah lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5 % (0.05) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model sementara yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*, kemudian untuk meyakinkan hasil uji tersebut dilakukan uji kedua yaitu Uji Chow, untuk menyeleksi model *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Berikut adalah hasil uji Chow Penelitian :

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/30/16 Time: 17:38
 Sample: 2009 2013
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 38
 Total pool (unbalanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KF?	-6.44E-05	0.126307	-0.000510	0.9996
BM?	13.97708	0.314175	44.48824	0.0000
R-squared	-5.625155	Mean dependent var		71.16402
Adjusted R-squared	-5.660584	S.D. dependent var		4.609146
S.E. of regression	11.89533	Akaike info criterion		7.800695
Sum squared resid	26460.31	Schwarz criterion		7.834999
Log likelihood	-735.1657	Hannan-Quinn criter.		7.814593
Durbin-Watson stat	0.798722			

Sumber : e-views 6, 2016, (data diolah peneliti)

Nilai probabilitas Uji Chow tersebut adalah sebesar 0.0000 dengan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5 % (0.05) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan kedua uji tersebut dapat diketahui bahwa model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah *Fixed Effect Model*. Berikut adalah hasil analisis regresi data panel penelitian dengan menggunakan *Fixed Effect Model*:

Tabel 5. Hasil Regresi Penelitian dengan Fixed Effect Model

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/30/16 Time: 17:37
 Sample: 2009 2013
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 38
 Total pool (unbalanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.38707	0.397642	166.9518	0.0000
KF?	0.157489	0.021142	7.449005	0.0000
BM?	0.635376	0.075236	8.445153	0.0000

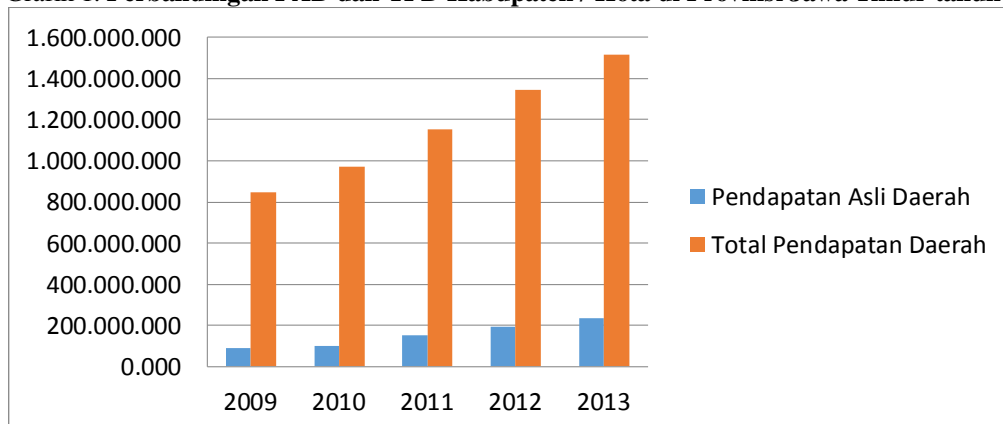
Sumber : e-views 6, 2016, (data diolah peneliti)

Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemandirian fiskal terhadap indeks pembangunan manusia dimana variabel kemandirian fiskal memiliki probabilitas sebesar 0,00000 lebih kecil dari nilai signifikansi α (5%) dan mempunyai nilai koefisien positif (+) yang berarti kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Yang dimaksud dengan kemandirian fiskal dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan yang artinya jika terjadi kenaikan pada kemandirian fiskal maka akan terjadi kenaikan pula pada indeks pembangunan manusia. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deca Pitron Lugastoro dan Septian Bagus Pambudi dalam penelitian terdahulu, bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan maksud dari desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia diharapkan berperan sebagai motor penggerak utama kebijakan otonomi daerah yang harus mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada supaya dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk dapat mewujudkan kemandirian fiskal dalam perencanaan, pengelolaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan agar dapat tercapai pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemampuan kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangannya dan rasio kemandirian fiskalnya. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar dalam total pendapatan daerah di masing-masing daerah seluruh Indonesia, khususnya untuk kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur. Semakin tingginya pendapatan asli daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunannya maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri.

Grafik 1. Perbandingan PAD dan TPD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 - 2013



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016, (data diolah peneliti)

Berdasarkan pada grafik 1. dapat dilihat bahwa kualitas pemerintah daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 – 2013 dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sangatlah rendah. Pendapatan asli daerah pemerintah daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Bahkan peningkatan pendapatan asli daerah tiap tahunnya tidak melebihi seratus milyar rupiah. Kondisi ini benar-benar miris dan jauh sekali dari kata mandiri yang mana pemerintah daerah sebagian besar pendapatan daerahnya berasal dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan. Pada gambar 1 diatas justru peningkatan dana perimbangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut bukan berarti dana perimbangan merupakan hal yang buruk, justru pengalokasian dana perimbangan kepada daerah adalah untuk mengatasi permasalahan ketimpangan horizontal. Beberapa daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bervariasi tergantung dari kondisi kekayaan alam dan sumber daya manusia yang beragam antar daerah. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Daerah yang mampu secara mandiri menyediakan pelayanan publik akan menerima dana perimbangan yang kecil dan sebaliknya bagi daerah yang terbatas kemampuan keuangan daerahnya untuk menyediakan pelayanan publik akan menerima porsi dana perimbangan dengan lebih besar.

Tabel 6. **Kualifikasi Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013**

Skala	Persentase PAD terhadap TPD	Kualifikasi	Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal
1	00,00% - 10,00%	Sangat Kurang	Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Sampang Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Madiun Kab. Probolinggo Kab. Bondowoso Kab. Blitar Kab. Trenggalek Kab. Situbondo Kab. Magetan Kab. Pamekasan Kota Batu Kab. Ponorogo Kab. Banyuwangi Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Nganjuk Kab. Bojonegoro Kab. Tulungagung Kab. Malang Kota Pasuruan Kota Mojokerto	4,6 % 5,3 % 5,5 % 5,7 % 5,7 % 6,0 % 6,4 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 6,9 % 7,0 % 7,0 % 7,1 % 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,6 % 8,7 % 8,9 % 9,3 % 9,3 % 9,7 % 9,8 %
2	10,01% - 20,00%	Kurang	Kota Probolinggo Kota Madiun Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Jember Kota Blitar Kab. Pasuruan Kab. Tuban Kota Kediri Kota Malang	10,1 % 10,5 % 10,9 % 10,9 % 10,9 % 11,0 % 11,3 % 13,1 % 14,2 % 15,5 %
3	20,01% - 30,00%	Sedang	Kab. Gresik Kab. Sidoarjo	21,3 % 25,3 %
4	30,01% - 40,00%	Cukup	-	-

5	40,01% - 50,00%	Baik	Kota Surabaya	42,6 %
6	> 50,00%	Sangat Baik	-	-

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016, (data diolah peneliti)

Tabel 6. merupakan kategori kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan kualifikasinya. Tabel tersebut menggambarkan bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Dimana 95% daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki kualifikasi kemampuan daerah dibawah 20,00%, yang artinya 95% daerah di kabupaten / kota Provinsi Jawa Timur masuk kedalam kategori 'kurang'. Sedangkan sisanya masuk kedalam kategori sedang dan baik. Dimana Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori 'sedang' dan Kota Surabaya masuk kedalam kategori 'baik'.

Pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah nya sendiri supaya daerah di Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat bisa lebih mandiri dan sedikit bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tentu terdapat masalah-masalah mengapa pemerintah daerah khususnya kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur sulit dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Meskipun kewenangan keuangan telah diberikan ke daerah, tetapi pemerintah daerah belum sepenuhnya menguasai kewenangan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Salah satunya yaitu pada basis pajak. Dimana dalam basis pajak yang besar telah dikuasai oleh pemerintah pusat sehingga pemberian kewenangan tersebut tidak akan berdampak besar terhadap peningkatan PAD. Selama ini PAD dalam pembiayaan kebutuhan daerah di sebagian besar daerah kurang dari 10% dan sangat bervariasi antar daerah dari 10% hingga 50%. Penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak oleh pemerintah pusat pada dasarnya dengan pertimbangan, antara lain, perlunya power yang besar dalam pemungutan pajak dan perlunya efisiensi ekonomi (dalam kaitannya dengan administrasi pemungutan, mobilitas objek pajak, fungsi stabilisasi, dan distribusi dari pajak). Hal ini menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah pusat untuk memiliki basis pajak yang besar. Permasalahan lain yang berkaitan dengan PAD adalah kewenangan perpajakan daerah yang sangat terbatas yang tercermin dari rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD (rata-rata kurang dari 10%). Keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah, dimana keterbatasan dana perimbangan dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerah idealnya dapat ditutup oleh daerah dengan menyesuaikan basis pajak atau tarif pajak daerahnya. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila kewenangan perpajakan dari daerah diperbesar (Khusaini, 2006).

Dalam hal ini, pastinya setiap daerah menginginkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah supaya daerah lebih mandiri lagi dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah akan semakin terpenuhi. Jika pembangunan daerah terlaksana maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga dengan demikian indeks pembangunan manusia kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur juga akan meningkat. Selain itu, daerah yang mandiri akan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik seperti perbaikan sarana penunjang kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah yang mandiri akan dapat meningkatkan nilai indeks pembangunan manusianya.

Upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya sudah menjadi perhatian yang serius bagi daerah-daerah yang belum mencapai membiayai pembangunan daerahnya dengan pendapatan asli daerahnya sendiri tanpa bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Namun, perlu dipertimbangkan juga bahwa upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus melihat sumber daya dan kemampuan daerah sehingga tidak terjadi *trade off*, dimana keinginan yang tinggi untuk mendongkrak / meningkatkan pendapatan asli daerah justru menjadi disinsentif yang mematikan. Kondisi ini terjadi jika pemerintah daerah membuat banyak kebijakan melalui peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi, tanpa melihat kemampuan daerah itu sendiri, sehingga akan membuat masyarakat terbebani dan membuat investor enggan untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha di daerah tersebut. Jikalau investasi di daerah tersebut tidak berjalan, tentunya pemerintah daerah akan sulit dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan ide-ide kreatif kepala daerah supaya menarik para investor untuk berinvestasi di daerah khususnya di kabupaten / kota Provinsi Jawa Timur. Jikalau investor banyak yang berinvestasi di daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya pendapatan asli daerah tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Dan jika strategi daerah ini berhasil maka tentunya akan meningkat indeks pembangunan manusia kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur.

Belanja Modal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja modal daerah terhadap indeks pembangunan manusia dimana variabel belanja modal daerah memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi α (5%) dan mempunyai nilai koefisien positif (+) yang berarti belanja modal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil regresi data panel dengan adanya

pengaruh yang positif dan signifikan menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan pada belanja modal daerah maka akan terjadi kenaikan pula pada indeks pembangunan manusia. Hal tersebut tidak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Yunitha Bau, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa belanja modal daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Perbedaan hasil estimasi ini dikarenakan kedua penelitian memiliki objek penelitian dan tahun penelitian yang berbeda. Karena suatu daerah memiliki prioritas belanja modal daerah dengan daerah lain.

Anggaran belanja daerah dalam APBD mempunyai peran yang vital dalam peningkatan pembangunan manusia. Anggaran belanja daerah merupakan pencerminan kebijakan pemerintah daerah yang diambil. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Pasti setiap anggota masyarakat menginginkan kemakmuran baik secara material maupun spiritual dalam arti dapat terpenuhi keinginan atau kebutuhannya yang selalu meningkat, menghendaki keamanan dan ketertiban (termasuk kestabilan), keadilan dan kemakmuran. Dalam hal ini pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut agar keinginan masyarakatnya dapat terpenuhi.

Di dalam anggaran belanja daerah terdapat post belanja modal daerah, yang mana belanja modal daerah ini merupakan kategori dari belanja langsung. Belanja modal daerah merupakan salah satu perangkat pemerintah yaitu sebagai pemacu dan pelancar pembangunan suatu negara atau daerah. Belanja modal daerah juga bisa diartikan sebagai investasi daerah yang mana nantinya dimasa yang akan datang akan menjadikan keuntungan baik dari segi materiil ataupun spiritual. Belanja modal daerah dapat mengarahkan pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada penduduk menengah kebawah melalui berbagai program-program pemerintah yang dianggarkan, dalam hal ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, melalui belanja modal daerah, pembangunan yang mengarah pada fokus peningkatan pembangunan manusia dapat berjalan dengan baik.

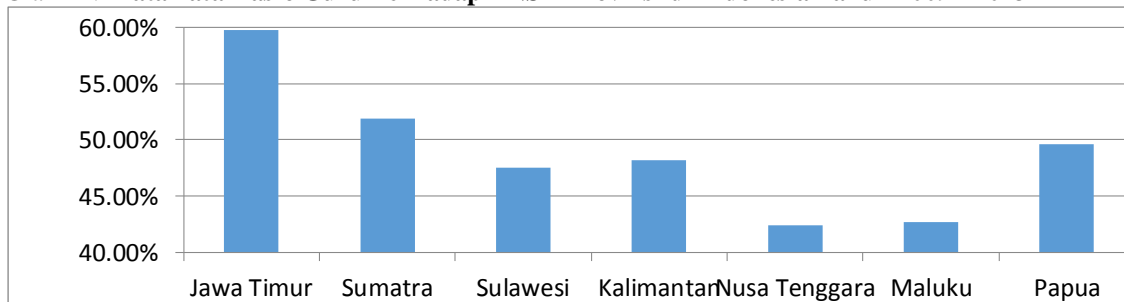
Hasil penelitian ini dimana belanja modal daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, maksudnya yaitu saat pemerintah mengeluarkan dana yang diperoleh baik dari pajak atau sumber penerimaan lainnya yang kemudian digunakan untuk membiayai investasi maupun pembangunan infrastruktur/prasarana maka pengeluaran ini akan mempekerjakan banyak tenaga kerja yang kemudian para tenaga kerja itu memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bebarengan dengan itu konsumsi agregat akan naik dan mendorong peningkatan produksi dan kembali mempekerjakan tenaga kerja yang kemudian pengangguran yang awalnya tinggi menjadi dapat ditekan atau diturunkan, terciptanya kesempatan kerja yang terbuka luas, kemiskinan dapat turun, dan semua itu adalah gambaran dari kesejahteraan yang meningkat dimana terjadi pencapaian standar hidup layak dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan dan kegiatan negara yang mempunyai kaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah termasuk pengeluaran pemerintah akan terus meningkat salah satunya karena meningkatnya fungsi pembangunan. Selain itu, pengaruh signifikan positif dari belanja modal daerah terhadap indeks pembangunan manusia juga berbanding lurus dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Mugrave. Mereka mengemukakan teori melalui pandangan mereka melalui pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa negara, bahwa tahap-tahap pembangunan negara akan berjalan dengan baik jika dikuatkan dengan pengeluaran pemerintah yang memadai. Berdasarkan teori tersebut, terdapat tiga tahapan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam suatu negara. Tahap pertama adalah pemerintah menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya untuk membangun pondasi awal tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan barang publiknya. Tahap kedua adalah pemerintah menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik dari tahap sebelumnya. Sedangkan tahap ke tiga adalah aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas- aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Dalam teori ini, tiga tahapan pembangunan tersebut dapat memberikan kesejahteraan yang sesungguhnya dalam pembangunan manusia pada masyarakat dengan adanya modal pengeluaran pemerintah yang teralokasi dengan baik. Pengeluaran pemerintah dalam mengembangkan pembangunan bisa terakumulasi melalui belanja modal di setiap daerah. Belanja modal sendiri merupakan investasi sektor publik dalam pengadaan aset tetap berwujud. Pengadaan aset tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada setiap daerah.

Pengeluaran pemerintah paling besar salah satunya adalah belanja pegawai. Yang mana belanja pegawai merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Hal ini akhirnya menimbulkan penilaian bahwa belanja pegawai dinilai terlalu besar yang mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk belanja yang lain seperti belanja barang jasa dan belanja modal daerah padahal mengacu pada fungsi belanja daerah yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan prioritas kepada pelaksanaan urusan daerah yang sifatnya wajib seperti pendidikan, pekerjaan umum, ketertiban dan keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kemampuan daya beli masyarakat dan sebagainya. Karena belanja modal daerah ini memiliki sifat berupa aset tetap dan bermanfaat untuk jangka panjang dan menjadikan belanja modal daerah ini sebagai modal atau pondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

ataupun pembangunan manusia. Dalam urusan wajib pemerintah daerah seperti pendidikan yang bertujuan meningkatkan IPM yang diukur melalui dimensi pengetahuan maka pengeluaran gaji pegawai yang dibebankan pada gaji guru sudah semestinya dianggarkan dalam jumlah yang besar karena akan memberikan stimulus bagi para guru PNSD dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Grafik 2. Rata-rata Rasio Guru Terhadap PNSD Provinsi di Indonesia Tahun 2009 - 2013



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016, (data diolah peneliti)

Berdasarkan grafik 2. terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki rasio tertinggi yaitu hampir 60%. Dapat disimpulkan bahwa daerah di Provinsi Jawa Timur mengalokasikan lebih dari setengah belanja pegawainya untuk membiayai guru daerah. Hal ini juga sejalan dengan pengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian IPM di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Disamping itu dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 juga disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan minimal 20% dari APBD. Artinya 20% belanja dari APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan bisa berupa sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan atau dana bantuan penyediaan buku-buku gratis bagi siswa dan lain sebagainya. Dalam Undang-undang tentang proksi dari belanja pendidikan, belanja kesehatan juga telah diatur dalam Undang-undang no 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besarnya anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji sedangkan untuk daerah dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.

Oleh karena itu, pemerintah daerah kab dan kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan mempunyai prioritas belanja yang mempunyai dampak meningkatkan indeks pembangunan manusia, terutama dalam hal ini yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu teliti dalam membatasi pengeluaran / belanja yang dirasa kurang memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan yang diukur lewat Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu perlunya sasaran yang tepat dalam pengalokasian belanja modal karena memang dalam beberapa penelitian terdahulu jenis belanja modal dianggap paling mampu mempengaruhi pembangunan khususnya pembangunan manusia. Kemudian perlunya ketaatan pemerintah daerah dalam mematuhi Undang-undang terkait belanja pendidikan dan belanja kesehatan yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 karena pendidikan dan kesehatan merupakan penentu kesejahteraan masyarakat.

Faktor Dominan

Faktor dominan menunjukkan variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan bisa dilihat melalui koefisien masing-masing variabel. Hasil regresi data panel menggunakan *fixed effect model* dalam penelitian ini variabel kemandirian fiskal mempunyai koefisien sebesar 0,157489 dan variabel belanja modal daerah mempunyai koefisien sebesar 0,635376. Berdasarkan nilai dari koefisien variabel yang dinyatakan signifikan dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa variabel belanja modal daerah merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

Individual Effect

Individual effect adalah perhitungan hasil regresi yang menggambarkan pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh kedua variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kemandirian fiskal dan belanja modal daerah terhadap indeks pembangunan manusia di masing-masing *observations* (daerah yang diteliti). *Individual effect* diperoleh berdasarkan nilai koefisien yang dimiliki masing-masing daerah ditambah dengan nilai koefisien konstanta dalam hasil regresi data panel menggunakan *fixed effect model* yang telah dilakukan. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil nilai *individual effect* dari masing-masing daerah kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 7. Nilai Individual Effect 38 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur

Rank	Wilayah	Individual Effect	Rank	Wilayah	Individual Effect
1	Kota Batu	7,537088	20	Kabupaten Magetan	0,048054
2	Kota Mojokerto	6,967727	21	Kabupaten Mojokerto	0,047581
3	Kota Pasuruan	6,872401	22	Kabupaten Lumajang	-0,111017
4	Kabupaten Situbondo	6,095957	23	Kabupaten Lamongan	-0,171949
5	Kota Kediri	5,894257	24	Kabupaten Pacitan	-0,830340
6	Kota Madiun	5,550979	25	Kabupaten Banyuwangi	-0,950532
7	Kota Malang	4,956501	26	Kabupaten Madiun	-1,700583
8	Kabupaten Blitar	3,215983	27	Kabupaten Ponorogo	-1,929672
9	Kabupaten Nganjuk	3,062070	28	Kabupaten Tulungagung	-1,999711
10	Kota Probolinggo	2,692499	29	Kota Surabaya	-2,086308
11	Kota Blitar	2,527293	30	Kabupaten Bojonegoro	-3,935913
12	Kabupaten Jombang	2,181854	31	Kabupaten Trenggalek	-4,506893
13	Kabupaten Tuban	2,070734	32	Kabupaten Bangkalan	-5,436496
14	Kabupaten Gresik	1,908553	33	Kabupaten Sumenep	-5,770371
15	Kabupaten Malang	1,827715	34	Kabupaten Pasuruan	-5,917110
16	Kabupaten Pamekasan	1,742709	35	Kabupaten Jember	-5,948077
17	Kabupaten Kediri	1,403421	36	Kabupaten Bondowoso	-6,886369
18	Kabupaten Ngawi	1,265884	37	Kabupaten Sampang	-7,054176
19	Kabupaten Probolinggo	0,687008	38	Kabupaten Sidoarjo	-13,040060

Sumber : e-views 6, 2016, (data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 7. diketahui bahwa terdapat 21 daerah yang memiliki *individual effect* positif sedangkan 17 daerah lain bernilai negatif. Nilai *individual effect* yang positif menunjukkan jika terjadi perubahan peningkatan pada kemandirian fiskal dan belanja modal daerah maka indeks pembangunan manusia di masing-masing daerah juga akan mengalami kenaikan. Perubahan penurunan pada kemandirian fiskal dan belanja modal daerah pada daerah yang mempunyai nilai *individual effect* yang negatif dapat menurunkan indeks pembangunan manusia sampai penurunan yang cukup besar hingga menyebabkan nilai *individual effect* yang negatif.

Dilihat dari nilai *individual effect* dapat diketahui bahwa daerah dengan nilai *individual effect* tertinggi berturut-turut adalah Kota Batu (7,537088), Kota Mojokerto (6,967727) dan Kota Pasuruan (6,872401), artinya jika terjadi perubahan pada kemandirian fiskal dan belanja modal daerah maka Kota Batu, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan adalah daerah yang terkena dampak paling besar pada indeks pembangunan manusia. Sedangkan nilai *individual effect* terendah berturut-turut adalah Kabupaten Bondowoso (-6,886369), Kabupaten Sampang (-7,054176), Kabupaten Sidoarjo (-13,040060) yang artinya bahwa jika terjadi perubahan pada kemandirian fiskal dan belanja modal daerah maka Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sidoarjo adalah daerah yang terkena dampak paling rendah pada indeks pembangunan manusia.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan tentang pengaruh tingkat kemandirian fiskal dan belanja modal daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 - 2013, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian fiskal memiliki probabilitas sebesar 0,00000 lebih kecil dari nilai signifikansi α (5%) dan mempunyai nilai koefisien positif (+) yang berarti kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan yang artinya jika terjadi kenaikan pada kemandirian fiskal maka akan terjadi kenaikan pula pada indeks pembangunan manusia. Perkembangan kemandirian keuangan daerah selama kurun waktu tahun 2009 – 2013 di 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur semakin membaik namun penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan masih lebih tinggi daripada yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata – rata rasio kemandirian fiskal provinsi jawa timur masih berada pada interval ‘kurang’, yang mana maksudnya adalah rata-rata sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan yang tinggi menjadikan pemerintahan di 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur untuk mengurus rumah tangga dengan kemampuan sendiri, sulit diwujudkan karena tidak mungkin membiayai penyelenggaraan pemerintah dengan PAD yang minim sekali.

2. Belanja modal daerah memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha(5\%)$ dan mempunyai nilai koefisien positif (+) yang berarti belanja modal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan pada belanja modal daerah maka akan terjadi kenaikan pula pada indeks pembangunan manusia Hal ini karena kebijakan pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur dalam pengalokasian dana belanja modal daerah yang sebagian besar dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berimbas pada pembangunan manusia yang meliputi bidang pendidikan dan kesehatan. Contohnya seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan peralatan pelajaran, dan juga meningkatkan sarana kesehatan.
3. Dalam uraian pada pembahasan bab IV diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan rasio kemandirian fiskal 38 kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan dalam beberapa kualifikasi menurut Tim Fisipol UGM dan Balitbang. Dimana daerah dengan kategori 'sangat kurang' adalah Kab. Ngawi (4,6 %), Kab. Pacitan (5,3 %), Kab. Sampang (5,5 %), Kab. Sumenep (5,7 %), Kab. Bangkalan (5,7 %), Kab. Madiun (6,0 %), Kab. Probolinggo (6,4 %), Kab. Bondowoso (6,5 %), Kab. Blitar (6,5 %), Kab. Trenggalek (6,5 %), Kab. Situbondo (6,7 %), Kab. Magetan (6,9 %), Kab. Pamekasan (7,0 %), Kota Batu (7,0 %), Kab. Ponorogo (7,1 %), Kab. Banyuwangi (7,8 %), Kab. Kediri (8,2 %), Kab. Lamongan (8,5 %), Kab. Lumajang (8,6 %), Kab. Nganjuk (8,7 %), Kab. Bojonegoro (8,9 %), Kab. Tulungagung (9,3 %), Kab. Malang (9,3 %), Kota Pasuruan (9,7 %), dan Kota Mojokerto (9,8 %). Lalu daerah dengan kategori 'kurang' adalah Kota Probolinggo (10,1 %), Kota Madiun (10,5 %), Kab. Mojokerto (10,9 %), Kab. Jombang (10,9 %), Kab. Jember (10,9 %), Kota Blitar (11,0 %), Kab. Pasuruan (11,3 %), Kab. Tuban (13,1 %), Kota Kediri (14,2 %), dan Kota Malang (15,5 %). Lalu daerah yang masuk dalam kategori 'sedang' adalah Kab. Gresik (21,3 %) dan Kab. Sidoarjo (25,3 %). Lalu daerah yang masuk kategori 'cukup' adalah tidak ada (nihil). Lalu daerah yang masuk kategori 'baik' adalah Kota Surabaya (42,6 %). Dan yang terakhir adalah daerah yang masuk kategori 'sangat baik' adalah tidak ada (nihil).

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan evaluasi kebijakan alokasi penggunaan Belanja Modal Daerah yang tentunya lebih dialokasikan pada bidang pendidikan dan kesehatan karena kedua bidang tersebut merupakan vital untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Supaya pengalokasian belanja modal untuk pendidikan dan kesehatan, maka tentu diperlukan pendapatan asli daerah yang besar pula. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan pajak karena pajak daerah sebagai penerimaan yang paling dominan untuk pendapatan asli daerah dan melakukan kebijakan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian khususnya pada bidang jasa, hotel dan restaurant serta industri pengolahan dan juga pertanian karena sektor-sektor tersebut memiliki nilai yang paling tinggi dalam pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan mempunyai prioritas belanja yang mempunyai dampak meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pemerintah perlu teliti dalam membatasi pengeluaran / belanja yang dirasa kurang memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan yang diukur lewat Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu perlunya sasaran yang tepat dalam pengalokasian belanja modal karena memang dalam beberapa penelitian terdahulu jenis belanja modal dianggap paling mampu mempengaruhi pembangunan khususnya pembangunan manusia. Kemudian perlunya ketaatan pemerintah daerah dalam mematuhi Undang-undang terkait belanja pendidikan dan belanja kesehatan yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 karena pendidikan dan kesehatan merupakan penentu kesejahteraan masyarakat.
3. Upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya sudah menjadi perhatian yang serius bagi daerah-daerah yang belum mencapai membiayai pembangunan daerahnya dengan pendapatan asli daerahnya sendiri tanpa bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Namun, perlu dipertimbangkan juga bahwa upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus melihat sumber daya dan kemampuan daerah sehingga tidak terjadi *trade off*, dimana keinginan yang tinggi untuk mendongkrak / meningkatkan pendapatan asli daerah justru menjadi disinsentif yang mematikan. Kondisi ini terjadi jika pemerintah daerah membuat banyak kebijakan melalui peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi, tanpa melihat kemampuan daerah itu sendiri, sehingga akan membuat masyarakat terbebani dan membuat investor enggan untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha di daerah tersebut

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Widarjono. 2009. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu. Ekonisia
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2013*. <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/235>, diakses tanggal 5 Maret 2016
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 1990 - 2014*. http://bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab3accordion-daftar_subjek1 , diakses tanggal 5 Maret 2016
- Baltagi, B.H. 2001. *Econometric analysis of panel data*, (2nd Edition). West Sussex : John Wiley & Sons, LTD.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2014. *Perkembangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur*, <http://bappeda.jatimprov.go.id/read/publikasi/>, diakses tanggal 2 Maret 2016
- Bau, Maria Yunitha. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Provinsi DIY Tahun 2005 – 2009*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2015. *Data Keuangan Daerah Setelah Tahun 2006*. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316, diakses tanggal 5 Maret 2016
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2009. *LGF Realisasi*. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316, diakses tanggal 5 Maret 2016
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2010. *LGF Realisasi*. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316, diakses tanggal 5 Maret 2016
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *LGF Realisasi*. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316, diakses tanggal 5 Maret 2016
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *LGF Realisasi*. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316, diakses tanggal 5 Maret 2016
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *LGF Realisasi*. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316 , diakses tanggal 5 Maret 2016
- Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, buku 2, Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, A. dan Damayanti, T. W. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Khusaini, Mohammad, 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga
- Lembaga Ketahanan Nasional. 1995. *Pembangunan Nasional*. Jakarta : Balai Pustaka

- Lugastoro, Decta P & Candra Fajri A. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Mahmudi. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makroekonomi*. Edisi Keempat. Terjemahan : Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga
- Pambudi, Septian Bagus. 2008. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat* [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Priambodo, Anugerah. 2015. *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten / Kotadi Pulau Jawa Tahun 2007 – 2013* [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Siahaan, M. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE UGM
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2009. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Erlangga
- Triastuti, Darwin M. dan Ratminto. 2005. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jogjakarta, Jurnal Sosio Sains*, volume 18 No. 2, April 2005 : 293-310.
- United Nations Development Programme. 2013. *Human Development Report*. <http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/>, diakses tanggal 23 Maret 2016
- Wati, Helmi Winda. 2015. *Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009 – 2013*, [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Yunitasari, M. 2007. *Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur*. [Skripsi]. Bogor : Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.